

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menggunakan Kerangka Isak 335 Dalam Mendukung Akuntabilitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Gereja Getsemani Babau)

Florensi Marlis Ablelo¹, Maria E.D Tunti², Ayuvera Rifani Ray³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang
florensimarlis13@gmail.com

Published: September , 2026

ABSTRACT

This study analyzes the presentation of financial statements using the ISAK 335 framework in supporting the accountability of financial information at Getsemani Babau Church, a congregation of the Christian Evangelical Church in Timor (GMIT). Using a descriptive qualitative case study, data were collected through observation, interviews with the Chair of the Congregational Assembly, the Treasurer, and the Chair of the Congregational Treasury Supervisory Body (BP3J), and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that financial management has passed through the recording, summarizing, and reporting stages, and that the Congregational Financial Information Report is delivered to the congregation and used for supervision. However, ISAK 335 has not been applied: the statements of financial position, comprehensive income, changes in net assets, cash flows, and the notes to the financial statements have not been prepared, and receipts are not separated by donor restrictions. From a stewardship perspective, the church board acts as a steward, and adopting ISAK 335 is needed to strengthen accountability.

Keywords: ISAK 335, Financial Statement Presentation, Accountability, Church, Stewardship Theory

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan menggunakan kerangka ISAK 335 dalam mendukung akuntabilitas informasi laporan keuangan di Gereja Getsemani Babau, salah satu jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat, Bendahara, dan Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BP3J), serta dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan gereja telah melalui tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan, serta Laporan Informasi Keuangan Jemaat disampaikan kepada jemaat dan digunakan untuk pengawasan. Namun, ISAK 335 belum diterapkan: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan belum disusun, serta penerimaan belum dipisahkan berdasarkan pembatasan dari pemberi sumber daya. Dari perspektif *stewardship theory*, pengurus gereja telah berperan sebagai *steward*, dan penerapan ISAK 335 diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas.

Kata Kunci: ISAK 335, Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Gereja, *Stewardship Theory*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara baik merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi karena berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009:3). Salah satu entitas pengguna akuntansi ialah organisasi nirlaba, yang dibangun dengan tujuan mengayomi kepentingan publik tanpa bertujuan mencari keuntungan demi kepentingan pribadi atau badan (Ningtyas dkk., 2024). Organisasi nirlaba tidak berorientasi pada perolehan laba tetapi tetap dituntut menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel melalui penyusunan laporan

keuangan (Bastian, 2014:205). Akuntabilitas menjadi penting karena sumber dananya berasal dari masyarakat, sehingga organisasi harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang kemudian digunakan kembali untuk kepentingan publik (Fitri dkk., 2023).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 yang memberikan pedoman bagi entitas nirlaba dalam menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. ISAK 335 merupakan interpretasi dari PSAK 1 yang disesuaikan untuk entitas nirlaba sehingga memungkinkan penyajian laporan keuangan dengan terminologi dan struktur yang lebih sesuai dengan karakteristik organisasi tersebut (IAI, 2025). Laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 terdiri dari lima komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2025). Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para pengguna, termasuk donatur dan masyarakat luas (Waruwu dkk., 2025). Sebagaimana pada organisasi nirlaba lainnya, akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi keagamaan (Firdausi & Amin, 2021). Dalam konteks gereja, akuntabilitas diwujudkan melalui pelayanan yang disertai pencatatan, pelaporan keuangan, serta evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

Gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang menjalankan pelayanan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diwariskan dan dijalankan secara berkelanjutan (Panggabean & Panggabean, 2025). Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga spiritual tetapi juga mengelola berbagai sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pelayanan, sosial, dan operasional. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan gereja sering kali masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku; laporan keuangan umumnya terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa penyajian laporan yang lengkap (Febrinda dkk., 2022). Gereja Getsemani Babau di Kabupaten Kupang berupaya menjalankan pengelolaan keuangan yang akuntabel kepada seluruh jemaat. Namun, berdasarkan pengamatan awal, laporan keuangan tahunan gereja masih bersifat umum dan belum menerapkan ISAK 335. Penyusunannya terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran selama satu periode berjalan, menitikberatkan arus kas masuk dan keluar tanpa pengelompokan akun yang sistematis serta tanpa informasi mengenai aset, kewajiban, dan saldo dana. Penyajian yang belum sesuai standar tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan agar pengelolaan keuangan lebih terstruktur dan akuntabel (Parabak dkk., 2022). Meskipun pengelolaan keuangan gereja berlandaskan nilai spiritual dan moral, aspek administratif dan akuntansi tetap memerlukan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga gereja dituntut menyajikan laporan yang lebih komprehensif, andal, dan mudah dipahami oleh jemaat.

Penelitian terdahulu pada organisasi nirlaba keagamaan dan pendidikan menunjukkan pola yang serupa, yaitu laporan keuangan masih sederhana, hanya memuat penerimaan dan pengeluaran, dan belum menerapkan ISAK 35. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Implementasi ISAK 35 mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba pada Gereja HKBP Aloban (Sianturi & Purba, 2024)	Kualitatif	Penyajian laporan keuangan masih sederhana, hanya memuat pemasukan dan pengeluaran. Peningkatan atau penurunan harta bersih dapat dilihat dari laporan penghasilan komprehensif, kewajiban, dan aset. Jika disusun berdasarkan ISAK 35, laporan akan sistematis dan terperinci.
2	Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan pada Masjid Besar Jampang Kulon (Husaeni dkk., 2024)	Kualitatif	Pengelolaan masih manual dengan hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas; pelaporan sederhana dan belum menerapkan ISAK 35.
3	Penerapan ISAK 35 laporan keuangan organisasi nonlaba pada MTs Al Washliyah Pajak Rambai Medan (Rifana dkk., 2023)	Kualitatif	Belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35: tidak menyajikan laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, dan perubahan aset neto, hanya laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

4	Penerapan ISAK 35 terhadap penyajian pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Yayasan RA Amal Shaleh (Diningsih dkk., 2023)	Kualitatif	Laporan hanya berupa penerimaan dan pengeluaran kas dari dana BOP dan iuran SPP; pencatatan sangat sederhana dan belum sesuai ISAK 35.
5	Implementasi ISAK No. 35 atas penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, studi kasus pada GMIM Bethesda Tatelu (Joylisti dkk., 2022)	Kualitatif	Laporan disusun berdasarkan buku Pedoman Pelayanan Pengawasan dan Pengelolaan Perbendaharaan GMIM berupa pendapatan, belanja, dan realisasi anggaran; belum mengimplementasikan ISAK 35.

Sumber: Data peneliti, 2026

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan metode kualitatif yang berfokus pada proses penyajian laporan keuangan gereja pada organisasi nirlaba. Perbedaannya terletak pada objek penelitian: penelitian ini mengkaji denominasi GMT, khususnya Gereja Getsemani Babau, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek HKBP, GMIM, masjid, madrasah, dan yayasan yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan berbeda secara struktural maupun administratif. GMT memiliki sistem tata gereja, regulasi perbendaharaan, dan budaya pengelolaan keuangan yang khas sehingga tidak dapat disamakan dengan denominasi lain. Penelitian ini juga secara eksplisit mengaitkan penyajian laporan dengan akuntabilitas keuangan gereja yang belum menjadi fokus utama penelitian sebelumnya. Kebaruan utamanya adalah penggunaan ISAK 335 sebagai pembaruan ISAK 35, sementara seluruh penelitian terdahulu masih menggunakan ISAK 35, sehingga penelitian ini lebih relevan dengan perkembangan regulasi akuntansi yang berlaku dan memberi kontribusi teoritis maupun praktis bagi perbaikan laporan keuangan gereja lokal di lingkungan Sinode GMT.

Landasan teori penelitian ini adalah *stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991), yang memandang *steward* sebagai pihak yang perilakunya diatur sedemikian rupa sehingga perilaku yang mendukung organisasi dan bersifat kolektif memiliki nilai manfaat lebih tinggi dibandingkan perilaku individualistik yang mengutamakan kepentingan pribadi. Teori ini mengasumsikan bahwa manajemen memiliki integritas tinggi serta mengarahkan kemampuan, kompetensi, dan keahliannya untuk mencapai tujuan organisasi (Siladjaja dkk., 2023:12). Sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik dirancang untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam hubungan pertanggungjawaban antara *steward* dan *principal* (Mardiasmo, 2009:12). Gereja mengelola sumber daya dari jemaat dan masyarakat sebagai amanah, sehingga pengurus gereja berkedudukan sebagai penerima sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas amanah tersebut. Penyajian laporan keuangan berbasis ISAK 335 karenanya tidak sekadar bersifat administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab dan profesionalitas untuk memperkuat akuntabilitas serta menjaga kepercayaan publik.

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009:4). Menurut IAI (2024), laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 terdiri dari lima komponen. Pertama, laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada waktu tertentu (Kieso dkk., 2017:239) dengan mengklasifikasikan aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan (Tuzahara dkk., 2025); ISAK 335 menyediakan Format A yang menyajikan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan, dan Format B yang tidak menyajikannya secara tersendiri (IAI, 2024:4-6). Kedua, laporan penghasilan komprehensif menggambarkan perubahan kinerja entitas selama satu periode, dalam Format A (kolom tunggal yang memudahkan penyusunan komparatif) atau Format B (sesuai klasifikasi aset neto). Ketiga, laporan perubahan aset neto menyajikan perubahan aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya selama periode pelaporan (IAI, 2024:10). Keempat, laporan arus kas menyajikan perubahan historis kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (IAI, 2009:28-30), baik dengan metode langsung maupun tidak langsung. Kelima, catatan atas laporan keuangan memuat informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan (Kieso dkk., 2017:267) yang dalam ISAK 335 mencakup Catatan A (hibah atau wakaf beserta pembatasannya), Catatan B (aset neto dengan

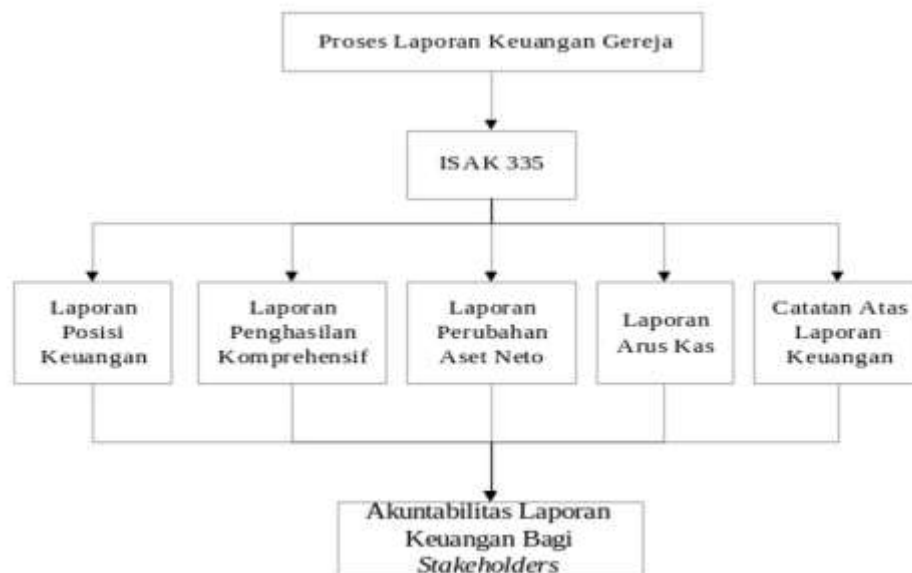
pembatasan berdasarkan tujuan atau periode), Catatan C (aset neto yang dibebaskan dari pembatasan), Catatan D (investasi pada nilai wajar), dan Catatan E (rincian beban) (IAI, 2024:13-17).

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi melalui media pertanggungjawaban secara berkala (BPKP, 2007:5). Mardiasmo (2009:20) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitasnya kepada pemberi amanah (*principal*). Pada organisasi keagamaan, pola pertanggungjawaban umumnya masih sederhana: pengurus dan pengawas bertanggung jawab kepada umat, biasanya melalui pertemuan umat atau rapat bersama. Akuntabilitas keuangan berarti kewajiban pengelola anggaran mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan, yang terwujud melalui kejelasan tujuan penggunaan dana dan transparansi dasar pengalokasian anggaran (Sirojudin dkk., 2026:240).

Secara etimologis, gereja berasal dari kata Yunani *ekklesia* yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar (Stanley & Ngoei, 2021), yaitu persekutuan umat yang berhimpun karena panggilan iman kepada Kristus, bukan karena ikatan etnis, budaya, atau status sosial. Sebagai organisasi nirlaba, gereja adalah entitas yang dibentuk untuk kepentingan sosial dan tidak memperkenankan pembagian surplus kepada pihak yang mengendalikannya (Mulyadi, 2001:272), dengan pendanaan yang bersumber dari sumbangan anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharap imbalan (IAI, 2011:1). Gereja memiliki tiga fungsi utama, yaitu *koinonia* (persekutuan), *marturia* (kesaksian), dan *diakonia* (pelayanan kasih) (GMIT, 2015), sehingga dana persembahan dan sumbangan perlu dipertanggungjawabkan secara jelas kepada umat melalui laporan keuangan yang sistematis dan sesuai standar.

Pengelolaan keuangan gereja dapat ditelaah melalui siklus akuntansi, yaitu proses sistematis yang mengubah transaksi keuangan menjadi informasi melalui pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan (Mulya dkk., 2024:2). Menurut Bastian (2005:214), tahap pencatatan mencakup identifikasi sumber dana, pengukuran bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, dan pemindahan ke buku besar; tahap pengikhtisaran mencakup neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik; sedangkan tahap pelaporan mencakup laporan aktivitas, laporan arus kas, dan neraca. Kelengkapan tahapan tersebut menjadi dasar penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang terstruktur dan informatif, sehingga penelitian ini menilai sejauh mana tahapan akuntansi telah diterapkan secara memadai sebagai landasan penyajian laporan keuangan gereja yang sesuai standar.

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan bagaimana gereja menyusun laporan keuangannya secara terstruktur dengan mengacu pada dua hal penting, yaitu ISAK 335 sebagai standar penyajian dan akuntabilitas sebagai tujuan akhirnya. Berdasarkan ISAK 335, gereja diwajibkan menyusun lima jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang seluruhnya bermuara pada akuntabilitas laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data peneliti, 2026

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses penyajian laporan keuangan menggunakan kerangka ISAK 335 dalam mendukung akuntabilitas informasi laporan keuangan di Gereja Getsemani Babau. Hasilnya diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi nirlaba dan menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi; bagi gereja sebagai acuan mengadopsi ISAK 335 yang lebih terstruktur dan akuntabel sehingga transparansi meningkat dan jemaat lebih mudah memahami kondisi keuangan; serta bagi penelitian selanjutnya pada denominasi gereja atau organisasi nirlaba lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus terjadi (Ramadhan, 2021:7), dengan memanfaatkan berbagai sumber data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Gunawan, 2013:141). Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang memaparkan fenomena secara sistematis melalui penggambaran kondisi, perbandingan data, serta penafsiran keadaan tertentu. Sugiyono (2018:18) menjelaskan bahwa peneliti menjadi instrumen utama dengan proses analisis data yang bersifat induktif, dan data yang dihasilkan umumnya berupa deskripsi hasil wawancara dan pengamatan lapangan (Poerwandari, 2007:22). Objek penelitian adalah Gereja Getsemani Babau, jemaat di bawah Sinode GMIT yang berlokasi di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi kajian dan memilih data yang relevan (Kimbal, 2015:65). Penelitian berfokus pada siklus akuntansi di Gereja Getsemani Babau yang mencakup pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan, karena siklus akuntansi menjadi dasar dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tema dan sub tema pada Tabel 2.

Tabel 2
Tema dan Sub Tema Penelitian

No	Tema	Sub Tema	Definisi
1	Tahap Pencatatan	Identifikasi dan pengukuran bukti transaksi	Mengenali dan mengukur transaksi keuangan gereja dalam satuan uang berdasarkan bukti seperti kuitansi persembahan, bukti sumbangan, nota pembelian, atau bukti pengeluaran kas.
		Pencatatan ke buku harian/jurnal	Mencatat transaksi secara kronologis dengan memisahkan akun penerimaan (tanpa dan dengan pembatasan) serta akun pengeluaran (beban pelayanan dan operasional).

		Posting jurnal ke buku besar	Memindahkan catatan jurnal ke akun buku besar sesuai kelompoknya (kas, persembahan, dana terikat, beban pelayanan) agar saldo akun diketahui.
2	Tahap Pengikhtisaran	Neraca saldo (<i>trial balance</i>)	Menyusun daftar saldo seluruh akun buku besar untuk memastikan jumlah debit dan kredit seimbang.
		Ayat jurnal penyesuaian	Jurnal akhir periode, misalnya penyusutan aset tetap, persembahan diterima di muka, atau reklasifikasi dana terikat.
		Kertas kerja (<i>worksheet</i>)	Merangkum neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan unsur laporan, termasuk pemisahan aset neto.
		Ayat jurnal penutup	Menutup akun sementara (pendapatan dan beban) lalu memindahkan surplus/defisit ke aset neto.
		Neraca saldo setelah penutupan	Neraca saldo yang hanya memuat akun riil: aset, liabilitas, dan aset neto.
		Ayat jurnal pembalik	Jurnal awal periode baru untuk membalik sebagian jurnal penyesuaian tertentu.
3	Tahap Pelaporan	Laporan posisi keuangan	Menyajikan aset, liabilitas, dan aset neto (dengan dan tanpa pembatasan) pada tanggal tertentu.
		Laporan penghasilan komprehensif	Menyajikan penerimaan dan beban gereja selama satu periode sehingga menghasilkan surplus atau defisit.
		Laporan perubahan aset neto	Menggambarkan perubahan aset neto, termasuk reklasifikasi ketika pembatasan dana berakhir.
		Laporan arus kas	Mengelompokkan kas ke aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
		Catatan atas laporan keuangan (CALK)	Menjelaskan profil gereja, kebijakan akuntansi, rincian pos, dan pengungkapan pembatasan dana.

Sumber: Data peneliti, 2026

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa catatan observasi, transkrip wawancara, catatan sejarah, memo, dan data fotografi (Sembiring dkk., 2023:44-45) yang diperoleh dari Gereja Getsemani Babau secara lisan maupun tulisan, sedangkan data kuantitatif berupa angka (Sembiring dkk., 2023:95), yaitu pencatatan laporan keuangan gereja. Sumber data terdiri dari data primer berupa teks hasil wawancara dengan pihak yang berwenang dan berinteraksi langsung dengan informan, serta data sekunder berupa arsip dan dokumen dari Gereja Getsemani Babau (Sembiring dkk., 2023:46).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Gunawan, 2013:141-175). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pencatatan dan pengelolaan keuangan gereja. Wawancara dilakukan secara personal kepada tiga informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, yaitu Ketua Majelis Jemaat, Bendahara, dan Ketua BP3J, menggunakan 20 butir pertanyaan pada hari Minggu, 2 Agustus 2026. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan menelaah laporan keuangan, bukti transaksi, dan catatan pembukuan gereja sebagai bukti empiris yang memperkuat data observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018:320-329) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan bertahap. Keabsahan data dijaga melalui pengecekan silang antarsumber dan teknik untuk meminimalkan bias, sehingga kesimpulan yang dihasilkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Gereja Getsemani Babau

Gereja Getsemani Babau merupakan salah satu jemaat di bawah naungan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Wilayah Babau telah menjadi pos pelayanan pekabar Injil sejak era badan zending Belanda (*Nederlandsche Zendeling-Genootschap*) pada abad ke-19, yang meletakkan dasar iman Kristen yang kuat bagi masyarakat setempat. Pertumbuhan jumlah jemaat mendorong dibangunnya gedung ibadah dan terbentuknya jemaat mandiri yang resmi dinamai Jemaat Getsemani Babau. Sebagai salah satu jemaat tua di kawasan tersebut, gereja ini menjadi simbol persekutuan iman sekaligus pusat kegiatan sosial

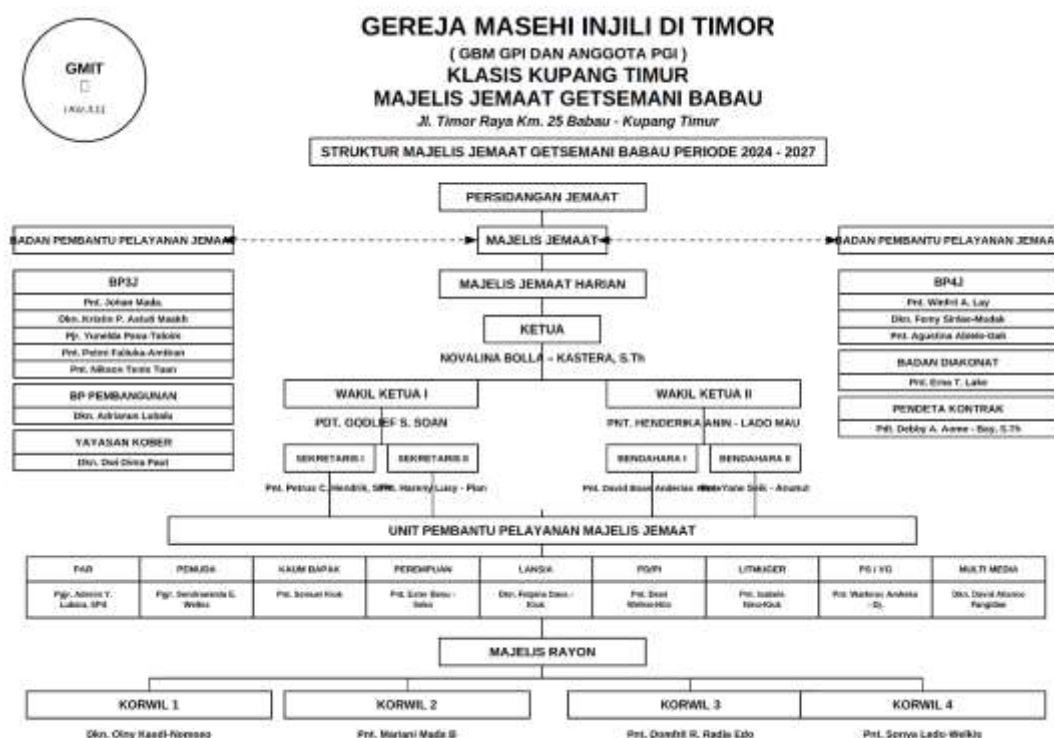
kemasyarakatan, bertindak sebagai induk pelayanan yang melahirkan beberapa wilayah pelayanan baru, dan kini menjadi bagian dari struktur pelayanan Klasis Kupang Timur.

Visi dan Misi

Visi GMIT adalah terwujudnya GMIT sebagai gereja yang misioner, yaitu gereja yang: (1) memahami diri sebagai keluarga Allah yang terikat oleh kasih Kristus dan ikut serta dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia; (2) memahami diri sebagai umat keluaran yang diutus membawa Syalom Allah, dengan seluruh anggotanya berfungsi sebagai surat Kristus yang hidup sesuai teladan Kristus, Sang Diakonos Agung; dan (3) jemaat-jemaatnya saling membina, membangun, dan bertumbuh menuju kedewasaan penuh sesuai kepenuhan Kristus. Untuk mewujudkan visi tersebut, GMIT melaksanakan misi pelayanan *Koinonia*, *Marturia*, *Diakonia*, *Liturgia*, dan *Oikonomia* (Panca Pelayanan GMIT), yaitu: (1) menghadirkan GMIT sebagai persekutuan Gereja Kristen yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli yang inklusif menyampaikan Syalom Allah dan memajukan kebaikan dunia dan kemanusiaan; (2) mengembangkan teologi dan spiritualitas yang menyatakan jati diri GMIT sebagai utusan Kristus; (3) menyatukan, mengarahkan, dan mendayagunakan karunia serta talenta anggota bagi jemaat dan masyarakat secara holistik, komprehensif, dan berkelanjutan; (4) menghadirkan GMIT sebagai komunitas ibadah yang visioner dan misioner; serta (5) membangun struktur dan fungsi GMIT yang berdisiplin, kreatif, produktif, dan memiliki akuntabilitas tinggi dalam azas presbiterial-sinodal serta kepedulian ekologi yang tinggi.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Majelis Jemaat Getsemani Babau periode 2024-2027 menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan serta hubungan koordinasi antara Majelis Jemaat, Badan Pembantu Pelayanan Jemaat, dan unit-unit pelayanan. Persidangan Jemaat berada pada puncak struktur, diikuti Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat Harian yang terdiri atas ketua, wakil ketua I dan II, sekretaris I dan II, serta bendahara I dan II. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat mencakup BP3J (Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat), BP4J, BP Pembangunan, Badan Diakonat, dan Yayasan Kober, sedangkan unit pembantu pelayanan meliputi PAR, Pemuda, Kaum Bapak, Perempuan, Lansia, PD/PI, Litmuger, PS/VG, dan Multi Media, yang bermuara pada Majelis Rayon (Korwil 1 sampai 4), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Struktur Organisasi GMIT Getsemani Babau

Sumber: Gereja Getsemani Babau, 2026

HASIL PENELITIAN

Laporan Informasi Keuangan Jemaat

Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi, dan wawancara, peneliti memperoleh Laporan Informasi Keuangan Jemaat Gereja Getsemani Babau yang disusun oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan gereja. Laporan tersebut memuat penerimaan dan belanja selama periode berjalan berdasarkan kegiatan pelayanan dan kebutuhan operasional, serta digunakan untuk menyampaikan informasi penerimaan dan penggunaan dana kepada jemaat dan pihak yang berkepentingan. Laporan bulan Maret 2026 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3

Laporan Informasi Keuangan Jemaat Gereja Getsemani Babau Bulan Maret 2026

INFORMASI KEUANGAN JEMAAT GETSEMANI BABAU BULAN MARET 2026		
Kode M.A	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENERIMAAN	
	Saldo Awal	54.787.559
1.1.1.1.	Kolekte	41.362.500
	Kolekte Ibadah Lainnya	2.095.000
	Kolekte Ibadah Kategorial/Fungsional	5.226.000
	Kolekte Ibadah Natal Lainnya	
1.1.1.1.45.	Kolekte Ibadah Keluarga Malam Natal	175.000
1.1.1.1.46.	Kolekte Ibadah Keluarga Akhir Tahun	195.000
	Kolekte Ibadah Buka/Tutup Usbu/Binroh	81.000
1.1.1.2.	Natura / Lelang	2.250.000
1.1.1.3.	Nazar	25.627.500
1.1.1.4.	Persepuluhan	
1.1.1.4.1	Persepuluhan Ibadah Minggu Utama	27.296.500
1.1.1.5.	Persembahan Jemaat Lainnya	
1.1.1.5.2.	Peti Derma/Kotak Diakonia	484.000
1.1.1.5.4.	Usaha Dana Panitia Hari Raya Gerejawi	9.885.000
1.1.5.	Lain-lain	4.794.596
1.2	Pembangunan	
1.2.1	Dalam Jemaat (Berupa Uang)	
1.2.1.1	Kolekte Ibadah Minggu	6.807.500
1.2.1.14	Persembahan Sukarela Pembangunan	1.318.000
1.2.1.17	Lelang Di Gereja	750.000
1.2.1.19	Biaya Sewa Scaffolding	100.000
	JUMLAH PENERIMAAN	87.085.096
	SALDO AWAL + PENERIMAAN	141.872.655
2	BELANJA	
2. 1.	Tanggungan Jemaat (Rutin)	21.518.000
2. 2. 2.	Belanja Majelis Jemaat dan Karyawan	
2. 2. 2. 1	Tunjangan Pendeta (Kesra, Jabatan, Khusus)	8.800.000
2. 2. 2. 3	Honor MJH non Pendeta dan Tenaga KontrA/Insentif	23.300.000
2. 2. 2. 4	Tunjangan MJH non Pendeta dan Tenaga Kontrak	1.500.000
2. 2. 3. 2	Belanja ATK dan Jasa Perkantoran	4.516.900
2. 2. 3. 3	Belanja Rapat dan Sidang	2.780.000
2. 2. 3. 4	Belanja Lain-lain Kebutuhan Kantor	814.118
2. 2. 4. 3	Pemeliharaan Inventaris Gereja	
2. 2. 4. 3. 3	Belanja Pemeliharaan Dinamo Air	54.000
2. 2. 5. 2	Mengikuti Kegiatan Dalam Klasis dan Dalam Jemaat	1.610.000
2. 2. 6	Lainnya	35.460.000

INFORMASI KEUANGAN JEMAAT GETSEMANI BABAU BULAN MARET 2026		
Kode M.A	Uraian	Jumlah (Rp)
2. 2. 10. 2. 3	Diakonia	
2. 2. 10. 2. 3. 6	Diakonia Duka Jemaat @Rp.500.000/orang	1.000.000
2. 2. 10. 2. 4	Liturgia	
2. 2. 10. 2. 4. 1	Belanja Pengadaan Buku Renungan TDTK 110 Buah	825.000
2. 2. 10. 3. 2	PHRG	
2. 2. 10. 3. 2. 1	Perayaan Paskah	15.885.000
2. 2. 10. 3. 6	UPP PEREMPUAN GMT	
2. 2. 10. 3. 6. 1	Ibadah Perempuan GMT lingkup Klasis	200.000
2. 2. 10. 3. 7	UPP LANSIA	
2. 2. 10. 3. 7. 1	Ibadah Gabungan dan Pemeriksaan Kesehatan	500.000
2. 3.	Pembangunan	
2. 3. 1.	Fisik	
2. 3. 1. 1	Pembangunan Pastori 3 / Setor Ke Kas Pemb	8.845.500
	JUMLAH PENGELUARAN	106.090.518
	PENERIMAAN BLN MARET 26 + SALDO AWAL BLN MARET 26	141.872.655
	PENGELUARAN BULAN MARET 2026	106.090.518
	SALDO AKHIR BULAN MARET 2026	35.782.137
	BPR TLM	3.874.541
	BANK NTT	8.488.658
	SALDO RILL	23.418.938

Sumber: Data Sekunder GMT Getsemani Babau, 2026

Berdasarkan Tabel 3, laporan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran selama periode berjalan yang disajikan menurut format pengelolaan keuangan gereja dan disusun oleh Bendahara Gereja berdasarkan transaksi yang telah dicatat. Pada Maret 2026, saldo awal sebesar Rp54.787.559 ditambah penerimaan Rp87.085.096 menghasilkan Rp141.872.655; setelah dikurangi pengeluaran Rp106.090.518, saldo akhir sebesar Rp35.782.137 yang terdiri atas BPR TLM Rp3.874.541, Bank NTT Rp8.488.658, dan saldo riil Rp23.418.938. Pengeluaran bulan tersebut melebihi penerimaan sebesar Rp19.005.422. Bendahara menjelaskan bahwa laporan memuat penerimaan dan pengeluaran rutin sesuai ketentuan perbendaharaan yang ditetapkan dalam persidangan sinode dan disusun berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana gereja. Pengelolaan keuangan gereja selanjutnya diuraikan melalui tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan.

Tahap Pencatatan

Pengelolaan keuangan gereja melibatkan Ketua Majelis Jemaat, Bendahara Gereja, dan Ketua BP3J. Ketua Majelis Jemaat dan Bendahara terlibat dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, Bendahara mencatat transaksi keuangan, dan Ketua BP3J mengawasi pengelolaan berdasarkan laporan yang disusun. Proses pencatatan diawali dengan mengidentifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran dari buku rayon, buku kategorial, buku ibadah, program pelayanan, laporan panitia, laporan tim pelayanan, dan ibadah khusus. Hasil wawancara dan observasi ringkas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Ringkasan Hasil Wawancara Tahap Pencatatan

Aspek	Ketua Majelis Jemaat	Bendahara Gereja	Ketua BP3J
Tugas dan tanggung jawab	Pengelolaan keuangan masuk dan keluar menjadi tanggung jawab Ketua dan Bendahara.	Pengawasan empat bulan sekali; laporan tahunan dipertanggungjawabkan kepada jemaat, majelis jemaat, dan Ketua BP3J.	Pengawasan empat bulan sekali dan mempertimbangkan seluruh pengelolaan keuangan.
Identifikasi transaksi	Dari buku rayon, buku kategorial, program pelayanan, dan laporan	Dilakukan setiap minggu dari buku-buku ibadah, dicatat dalam	Melalui laporan buku pelayanan dari majelis setelah ibadah selesai.

	rayon, kategorial, panitia, tim pelayanan, serta ibadah khusus.	format penerimaan yang dibuat Bendahara.	
Bukti transaksi	Laporan masuk, nota, kuitansi, slip belanja, dan konsumsi.	Nota, kuitansi, dan slip belanja.	Nota, bukti transfer, dan kuitansi.
Pencatatan transaksi	Dicatat Bendahara dalam buku kas yang telah memiliki format penerimaan dan pengeluaran.	Dicatat dalam Buku Kas Umum yang mencakup penerimaan dan pengeluaran.	Dicatat Bendahara dalam buku kas sesuai format yang digunakan.
Penerimaan bertujuan khusus	Dicatat per pos; persembahkan rutin dan sumbangan khusus dicatat bersama.	Tidak ada pembatasan karena dibagi per pos; persembahkan rutin dan sumbangan khusus digabung.	Dicatat berdasarkan pos yang ditetapkan; penerimaan rutin dan sumbangan khusus dalam pos yang sama.
Pengeluaran	Dikelompokkan per pos dan jenis kebutuhan (pelayanan, transportasi, operasional).	Setiap pengeluaran punya pos sendiri; biaya transportasi dan pelayanan dipisah.	Dikelompokkan per pos agar penggunaan dana terlihat menurut jenis biaya dan kegiatan.
Pemindahan catatan	Dimasukkan ke Buku Kas Umum (BKU).	Dari buku kas penerimaan dan pengeluaran ke BKU.	Dimasukkan ke BKU; Ketua BP3J memeriksa laporan yang disusun.

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

Bukti transaksi menjadi dasar pencatatan, dan transaksi dicatat setiap kali terdapat penyetoran dari majelis, jemaat, maupun pihak lain. Bendahara Gereja menyatakan, “Tidak ada pembatasan karena di bagi per pos, jadi digabung persembahkan rutin dan sumbangan khusus.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerimaan belum dipisahkan berdasarkan pembatasan penggunaan dana. Pengamatan menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan Bendahara sesuai pos yang digunakan dalam pengelolaan keuangan gereja.

Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran dilakukan setelah penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas. Data yang telah dicatat dirangkum menggunakan format pemasukan dan pengeluaran yang dipakai gereja, kemudian diperiksa, diperbaiki apabila ditemukan perbedaan, dan ditutup pada akhir periode. Rincian temuan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Ringkasan Hasil Wawancara Tahap Pengikhtisaran

Aspek	Ketua Majelis Jemaat	Bendahara Gereja	Ketua BP3J
Neraca dan pengecekan	Neraca dicatat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran, dicek setiap minggu apakah balance.	Neraca disusun setiap bulan dalam laporan keuangan; neraca biasa sesuai penerimaan dan pengeluaran, diawasi Ketua BP3J.	Hanya melaksanakan pemeriksaan dari laporan yang telah disusun Bendahara.
Perbaikan pencatatan	Kesalahan diperbaiki sebelum pelaporan, sejauh ini minim, misalnya salah input biaya ke pos.	Perbaikan saat tutup buku, misalnya pengeluaran tercatat tetapi bukti belum dimasukkan sehingga selisih segera diperbaiki.	Perbedaan catatan dan bukti disampaikan ke Bendahara untuk diperbaiki sebelum laporan selesai.
Perangkuman data	Dirangkum berdasarkan format gereja sebagai dasar laporan.	Dirangkum dalam format pemasukan dan format pengeluaran.	Data dalam format penerimaan dan pengeluaran menjadi dasar pemeriksaan dan pengawasan.
Tutup buku dan saldo	Sisa saldo saat tutup buku menjadi saldo awal bulan berjalan.	Saldo terdiri atas simpanan Bank NTT, Bank TLM, dan saldo riil; menjadi saldo akhir lalu saldo awal bulan berikutnya.	Saldo akhir diperiksa berdasarkan laporan dan digunakan sebagai saldo awal periode berikutnya.

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, pengikhtisaran dilakukan dengan format penerimaan dan pengeluaran serta pemeriksaan saldo dan pencatatan sebelum laporan keuangan diselesaikan. Pencatatan diperiksa pada saat penyusunan dan tutup buku, sedangkan kesalahan atau

perbedaan yang ditemukan diperbaiki sebelum laporan diselesaikan. Saldo akhir dicatat dan digunakan sebagai saldo awal pada periode berikutnya.

Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setelah pencatatan dan pengikhtisaran, dengan menyusun Laporan Informasi Keuangan Jemaat yang memuat penerimaan, pengeluaran, dan saldo keuangan. Laporan disusun berdasarkan pencatatan bulanan menggunakan format gereja, disampaikan kepada jemaat melalui warta pelayanan pada kebaktian minggu (tertulis maupun lisan), dan digunakan Ketua BP3J sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan. Bentuk pelaporan mencakup informasi penerimaan dan pengeluaran, pencatatan aset dalam buku inventaris, dan informasi keuangan dalam laporan gereja. Temuan pelaporan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Ringkasan Hasil Wawancara Tahap Pelaporan

Aspek	Ketua Majelis Jemaat	Bendahara Gereja	Ketua BP3J
Bentuk laporan	Laporan informasi keuangan jemaat berisi pemasukan dan penerimaan, disampaikan lewat warta pelayanan, tertulis maupun lisan.	Laporan informasi keuangan jemaat berisi penerimaan dan pengeluaran rutin sesuai perbendaharaan yang diatur persidangan sinode.	Memuat penerimaan, pengeluaran, dan saldo; diperiksa Ketua BP3J dalam pengawasan.
Penyajian per periode dan surplus	Disajikan per bulan sesuai format; surplus dibagi ke klasis, jemaat, dan sinode sesuai perbendaharaan sinode.	Disajikan per bulan sesuai format; surplus besar akhir tahun dijadikan dana cadangan, termasuk saldo bank.	Disajikan berdasarkan catatan bulanan dan diperiksa sebagai pengawasan.
Laporan perubahan aset neto	Belum ada; kondisi keuangan disajikan melalui penerimaan, pengeluaran, dan saldo.	Belum disusun; perubahan terlihat dari penerimaan, pengeluaran, dan saldo.	Belum ada; perubahan diperiksa dari laporan penerimaan, pengeluaran, dan saldo.
Laporan arus kas	Belum disusun; pendanaan dicatat dalam laporan penerimaan dan pengeluaran, investasi belum dicatat khusus.	Belum disusun; penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam laporan keuangan gereja.	Belum dibedakan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Catatan atas laporan keuangan	Belum disusun secara khusus.	Tidak ada.	Belum disusun secara terpisah.

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

Ketiga informan menyatakan bahwa laporan keuangan dipertanggungjawabkan kepada jemaat secara berkala. Ketua Majelis Jemaat menjelaskan bahwa laporan disampaikan lewat warta pelayanan pada kebaktian minggu dan pada akhir periode digunakan sebagai dasar laporan pertanggungjawaban. Bendahara menyatakan laporan disampaikan setiap minggu dan bulan sehingga di akhir terdapat laporan pertanggungjawaban, sedangkan Ketua BP3J menyatakan laporan yang disusun Bendahara diperiksa sebagai bagian dari pengawasan. Terkait kelebihan dan kekurangan dana, Ketua Majelis Jemaat menyatakan gereja selalu menetapkan target sesuai program dan menunda kegiatan yang kurang penting jika dana kurang; Bendahara menyatakan kelebihan dihitung sebagai surplus, pengeluaran dibatasi sesuai dana yang diprogramkan, dan kekurangan tidak ada; Ketua BP3J menyatakan penggunaan dana disesuaikan dengan program dan kebutuhan yang direncanakan.

Ketiga informan juga menyatakan belum mengetahui dan belum pernah mendengar tentang ISAK 35. Ketua Majelis Jemaat menjelaskan bahwa penyusunan laporan selama ini mengikuti format dan ketentuan perbendaharaan yang berlaku dalam lingkungan GMIT, dan Ketua BP3J menyatakan pengawasan dilakukan berdasarkan laporan keuangan dan ketentuan perbendaharaan yang digunakan gereja. Mengenai akuntabilitas, para informan memaknainya sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai transaksi yang terjadi, yang diwujudkan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pemeriksaan, serta penyampaian informasi keuangan kepada jemaat melalui warta pelayanan. Secara keseluruhan, pelaporan gereja masih berfokus pada penerimaan, pengeluaran, dan saldo dalam format sederhana, sementara informasi aset dicatat dalam buku inventaris dan komponen laporan yang dipersyaratkan ISAK 335 secara lebih lengkap belum seluruhnya tersedia.

DISKUSI

Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan keuangan Gereja Getsemani Babau telah dilakukan melalui identifikasi transaksi, penggunaan bukti transaksi, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pengelompokan berdasarkan pos, serta pemindahan catatan ke Buku Kas Umum (BKU). Hasil ini sejalan dengan siklus akuntansi sektor publik menurut Bastian (2005:214), yang menyatakan bahwa pencatatan dimulai dari identifikasi sumber dana, pengukuran bukti transaksi, dan penyiapan dokumen pencatatan, lalu dicatat dalam jurnal dan dipindahkan ke buku besar sesuai kelompok transaksinya. Penggunaan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan dan pengelompokan transaksi berdasarkan jenis dan penggunaannya menunjukkan proses yang mendukung tersedianya informasi keuangan bagi tahap pengikhtisaran dan pelaporan.

Melalui *stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991), Bendahara dan pengurus berperan sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya yang dipercayakan jemaat. Identifikasi transaksi, penggunaan bukti, dan pengelompokan transaksi menunjukkan upaya pengurus menjalankan tanggung jawab secara tertib, sehingga pencatatan tidak hanya menjadi kegiatan administratif tetapi juga pelaksanaan tanggung jawab menjaga amanah. Kelemahan tahap ini terlihat dari belum adanya pemisahan penerimaan berdasarkan pembatasan penggunaan dana sebagaimana diperlukan dalam penyajian ISAK 335: persembahan rutin dan sumbangan khusus dicatat bersama berdasarkan pos tanpa menunjukkan sumber daya yang dapat digunakan bebas dan sumber daya yang dibatasi pemberinya. Kondisi ini membuat status penggunaan dana kurang jelas serta memengaruhi pengikhtisaran dan pelaporan karena informasi pembatasan dana belum tersedia sejak pencatatan (IAI, 2024).

Hasil ini sejalan dengan Joylisti dkk. (2022), yang menemukan bahwa laporan Jemaat GMIM Bethesda Tatelu disusun berdasarkan pedoman perbendaharaan yang memuat pendapatan, belanja, dan realisasi anggaran. Persamaannya terletak pada penggunaan pedoman atau format yang telah ditetapkan gereja serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan lebih rinci proses pencatatan melalui identifikasi, bukti transaksi, pengelompokan pos, dan pemindahan ke BKU. Keduanya menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan sesuai sistem pengelolaan keuangan masing-masing gereja meskipun penyajian laporan belum sepenuhnya mengacu pada ISAK 335.

Tahap Pengikhtisaran

Pengikhtisaran dilakukan melalui perangkuman data penerimaan dan pengeluaran, penyusunan neraca, pemeriksaan pencatatan, perbaikan kesalahan, dan tutup buku pada akhir periode, dengan saldo akhir menjadi saldo awal periode berikutnya. Menurut Bastian (2005:214), tahap ini semestinya mencakup neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Gereja belum menyusun tahapan tersebut secara lengkap karena pencatatan masih memakai format penerimaan dan pengeluaran yang telah diterapkan. Dari perspektif *stewardship theory*, pemeriksaan dan perbaikan selisih antara catatan dan bukti, yang dilakukan Bendahara bersama Ketua BP3J sebelum laporan diselesaikan, mencerminkan tanggung jawab pengurus menjaga keandalan informasi keuangan (Donaldson & Davis, 1991).

Kelemahan tahap ini adalah belum adanya pengelompokan dan penyesuaian informasi yang mendukung penyajian ISAK 335. Data yang dirangkum berdasarkan format penerimaan dan pengeluaran belum memperlihatkan perubahan aset neto, pemisahan aset neto tanpa dan dengan pembatasan, maupun unsur keuangan lainnya, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kelima komponen laporan belum tersedia secara terstruktur (IAI, 2024). Temuan ini sejalan dengan Husaeni dkk. (2024), yang menemukan pengelolaan keuangan Masjid Besar Jampang Kulon dilakukan manual melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa penerapan ISAK 35. Perbedaannya, pada Gereja Getsemani Babau terdapat pemeriksaan oleh Ketua BP3J serta perbaikan atas kesalahan atau perbedaan pencatatan sebelum laporan diselesaikan.

Tahap Pelaporan

Pelaporan dilakukan melalui Laporan Informasi Keuangan Jemaat yang memuat penerimaan, pengeluaran, saldo, dan surplus, disampaikan kepada jemaat melalui warta pelayanan, serta digunakan Ketua BP3J untuk pemeriksaan dan pengawasan. Hasil ini belum sepenuhnya sesuai dengan siklus akuntansi Bastian (2005:214), yang mencakup laporan aktivitas (surplus atau defisit), laporan arus kas, dan neraca. Informasi penerimaan, pengeluaran, saldo, dan surplus belum disajikan dalam laporan aktivitas, laporan arus kas, dan neraca yang terpisah. Dari perspektif *stewardship theory*, penyusunan laporan, penyampaian melalui warta pelayanan, dan penggunaannya oleh Ketua BP3J menunjukkan upaya pengurus bertanggung jawab secara terbuka kepada jemaat sebagai pemberi amanah (Donaldson & Davis, 1991).

Kelemahan tahap pelaporan terlihat dari belum disusunnya laporan keuangan lengkap berdasarkan ISAK 335, terutama laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tanpa laporan perubahan aset neto, perubahan sumber daya dan pemisahan aset neto tanpa dan dengan pembatasan belum terlihat; tanpa laporan arus kas, sumber dan penggunaan kas belum tersaji khusus; dan tanpa catatan atas laporan keuangan, informasi penjelas untuk memahami angka dalam laporan menjadi terbatas (Sianturi & Purba, 2024). Kondisi ini mengurangi kelengkapan informasi yang digunakan jemaat dan Ketua BP3J untuk memahami, memeriksa, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya gereja. Hasil ini sejalan dengan Sianturi & Purba (2024) pada Gereja HKBP Aloban yang laporan keuangannya sederhana karena hanya memuat pemasukan dan pengeluaran. Perbedaannya terletak pada penyampaian laporan kepada jemaat melalui warta pelayanan dan penggunaan laporan oleh Ketua BP3J untuk pemeriksaan dan pengawasan.

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 335 dan Akuntabilitas

Secara keseluruhan, gereja telah memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang berjalan, tetapi penyajiannya belum menerapkan ISAK 335, sebagaimana dirangkum pada Tabel 7. Para informan belum mengetahui ISAK 35 karena penyusunan laporan mengikuti format dan ketentuan perbendaharaan GMTI, dan akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban yang transparan dan jujur melalui pencatatan, pemeriksaan, dan penyampaian informasi kepada jemaat. Pemahaman tersebut sejalan dengan gambaran Mardiasmo (2009:20) dan penelitian Sianturi & Purba (2024) tentang pola pertanggungjawaban organisasi keagamaan yang masih sederhana. ISAK 335 melengkapi mekanisme tersebut dengan informasi aset, liabilitas, aset neto, pembatasan dana, perubahan sumber daya, arus kas, serta penjelasan atas laporan keuangan (IAI, 2024).

Tabel 7

Kesenjangan Penyajian Laporan Keuangan Gereja Getsemani Babau terhadap Komponen ISAK 335

Komponen ISAK 335	Kondisi di Gereja Getsemani Babau	Informasi yang belum tersedia
Laporan posisi keuangan	Belum disusun; neraca yang dibuat sebatas penerimaan dan pengeluaran; aset dicatat dalam buku inventaris.	Aset, liabilitas, dan aset neto (tanpa dan dengan pembatasan).
Laporan penghasilan komprehensif	Penerimaan, pengeluaran, saldo, dan surplus disajikan dalam Laporan Informasi Keuangan Jemaat, belum dalam format ISAK 335.	Penyajian penghasilan dan beban menurut format A atau B.
Laporan perubahan aset neto	Belum disusun secara khusus.	Perubahan aset neto dan reklasifikasi pembatasan dana.
Laporan arus kas	Belum disusun; belum dibedakan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.	Arus kas menurut tiga aktivitas.
Catatan atas laporan keuangan	Belum disusun.	Kebijakan akuntansi, rincian pos, dan Catatan A-E.

Sumber: Data peneliti, 2026

Dari perspektif *stewardship theory*, pengurus gereja telah menunjukkan tanggung jawab sebagai *steward* melalui pencatatan, pemeriksaan, penyampaian informasi, dan pengawasan keuangan. Penerapan ISAK 335 diperlukan untuk melengkapi proses tersebut sehingga jemaat dapat memahami kondisi dan penggunaan sumber daya gereja dengan lebih jelas. Kebaruan temuan ini terletak pada

penggunaan ISAK 335 sebagai pembaruan ISAK 35 pada jemaat GMTT, yang belum banyak dikaji dalam konteks penyajian laporan keuangan nirlaba (IAI, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tahap pencatatan telah dilakukan melalui identifikasi transaksi, penggunaan bukti transaksi, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta pengelompokan transaksi, namun penerimaan belum dipisahkan berdasarkan pembatasan penggunaan dana. (2) Tahap pengikhtisaran dilakukan melalui perangkuman data, pemeriksaan, perbaikan kesalahan, dan tutup buku, tetapi belum mencakup neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, ayat jurnal penutup, dan ayat jurnal pembalik. (3) Tahap pelaporan dilakukan melalui Laporan Informasi Keuangan Jemaat yang memuat penerimaan, pengeluaran, saldo, dan surplus serta disampaikan kepada jemaat dan Ketua BP3J sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan pengawasan. (4) Penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan ISAK 335 karena laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan belum disajikan secara lengkap. (5) Dari perspektif *stewardship theory*, pengurus gereja telah menjalankan peran sebagai *steward*, dan penerapan ISAK 335 dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui informasi keuangan yang lebih lengkap.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan telah menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban pengurus kepada jemaat, sedangkan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, pembatasan dana, perubahan sumber daya, arus kas, serta penjelasan atas laporan keuangan belum tersaji menyeluruh sehingga masih perlu dilengkapi.

REKOMENDASI

Bagi Gereja Getsemani Babau, pengelolaan keuangan yang telah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih tertib, sistematis, dan mendukung akuntabilitas, dengan pencatatan yang tetap disertai bukti lengkap serta pengelompokan transaksi yang lebih jelas. Pengurus, khususnya pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, perlu meningkatkan pemahaman mengenai ISAK 335 agar pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan mendukung penyajian informasi yang lebih jelas kepada jemaat. Gereja disarankan mengadopsi ISAK 335 sehingga laporan yang selama ini memuat penerimaan, pengeluaran, dan saldo dapat dilengkapi dengan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas ruang lingkup dengan melibatkan beberapa gereja atau organisasi nirlaba agar diperoleh gambaran lebih luas serta persamaan dan perbedaan penerapan ISAK 335 sesuai karakteristik masing-masing. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji faktor pendukung dan penghambat penerapan standar, termasuk kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengawasan keuangan, serta sejauh mana ISAK 335 berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

REFERENSI

- Bastian, I. (2005). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (S. Saat & Y. Sumiharti, Eds.). Erlangga. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=984399>
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi sektor publik: Pengertian menurut ahli, tujuan, jenis*. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/>
- BPKP. (2007). *Akuntabilitas instansi pemerintah 2007* (F. T. Oktiarti, Ed.; 5th ed.). <https://jabatanfungsionalauditor.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/06/07-akuntabilitas-instansi-pemerintah.pdf>
- Diningsih, S. A., Yulianti, N. C., & Maharani, A. (2023). Penerapan ISAK 35 terhadap penyajian pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Yayasan RA Amal Shaleh. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME)*, 2(1), 115-122. <https://doi.org/10.36841/jme.v2i1.2649>
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>

- Febrinda, T., Mony, G., & Suhartini, D. (2022). Analisis tata kelola keuangan pada Gereja Kristen Indonesia Merisi Indah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Firdausi, I. C., & Amin, M. Al. (2021). Akuntabilitas pondok pesantren dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. *Borobudur Accounting Review*, 1(1), 57-65. <https://doi.org/10.31603/bacr.4880>
- Fitri, S. A., Fadillah, N., Agusti, D. M., Janna, M., Putri, F., Jeniva, N., Aulia, M., Khairat, I., Naswani, P., Fitriyani, A., Nurfadillah, Marzuki, P., Elfira, Nurdianis, Afriyani, & Adriansyah. (2023). *Akuntansi organisasi nirlaba* (M. R. Kurnia, Ed.). Sada Kurnia Pustaka.
- GMIT. (2015). *Pokok-pokok eklesiologi GMIT*. <https://sinodegmit.or.id/>
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori & praktik* (Edisi pertama). PT Bumi Aksara.
- Husaeni, I., Indrawan, A., & Martaseli, E. (2024). Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan pada Masjid Besar Jampang Kulon. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2487>
- IAI. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Dewan Standar Akuntansi Indonesia.
- IAI. (2011). *PSAK No. 45: Pelaporan keuangan entitas nirlaba*. Dewan Standar Akuntansi Indonesia.
- IAI. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ISAK 335: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2025). *Post implementation review ISAK 335: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Dewan Standar Akuntansi Indonesia.
- Joylisti, G., Ivonne, T., Putong, H., & Nugraha, J. (2022). Implementasi ISAK No. 35 atas penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba (Studi kasus pada GMIM Bethesda Tlatel). 6(2), 3753-3762. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3563>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Akuntansi keuangan menengah: Intermediate accounting* (T. Hidayat, Ed.). Salemba Empat.
- Kimbal, R. W. (2015). *Modal sosial dan ekonomi industri kecil: Sebuah studi kualitatif*. Deepublish Publisher.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Yogyakarta.
- Mulya, K. S., Anggraeni, A. F., Hakim, A., Anom, N. L. P., Pancawati, Edy, S. A., Muslih, R. A., Ilyas, H., Zuliyana, M., Risakotta, K. A., Devi, S., Alfia, Y. D., Amalia, M. M., Mariadi, Y., & Utami, F. L. (2024). *Buku ajar dasar ilmu akuntansi* (E. Efitra, N. Safitri, & Sepriano, Eds.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulyadi. (2001). *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen: Sistem pelipatganda kinerja perusahaan* (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Ningtyas, B. A. W., Nuryati, P., & Suryandari, M. (2024). Kontribusi organisasi nirlaba dalam mengelola program dakwah berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.4280>
- Panggabean, J. S. E. A., & Panggabean, M. E. (2025). Gereja sebagai organisasi nirlaba: Ketika nilai-nilai akuntansi dan loyalitas memengaruhi intensi umat untuk donasi. *Modus Universitas Atma Jaya*, 37(1), 1-17. <https://doi.org/10.24002/modus.v37i1.9064>
- Parabak, A. R., Mongan, B., & Todingbua, M. (2022). Analisis prosedur pencatatan laporan keuangan di Gereja Toraja Jemaat Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Economics and Business Review*, 1(2), 67-73.
- Poerwandari, K. (2007). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia* (Edisi ke-3). Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian* (A. A. Effendy, Ed.). Cipta Media Nusantara.
- Rifana, M., Kamilah, & Syahriza, R. (2023). Penerapan ISAK 35 laporan keuangan organisasi nonlaba pada MTs Al Washliyah Pajak Rambai Medan. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 516-524.
- Sembiring, T., Irnawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). *Buku ajar metodologi penelitian: Teori dan praktik* (B. Ismaya, Ed.). CV Saba Jaya Publisher.
- Sianturi, V. U., & Purba, S. (2024). Implementasi ISAK 35 mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba pada Gereja HKBP Aloban. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN (ABDIMAS SEAN)*, 2(1), 21-27. <https://doi.org/10.58471/abdimassean.v2i01.315>

- Siladjaja, M., Nugrahanti, T. P., & Magdalena, P. (2023). *Teori akuntansi positif: Sebuah tinjauan pada persepsi berbasis rational decision model terhadap informasi akuntansi berkualitas* (M. Jumianti, Ed.; Edisi ke-1). CV Mega Press Nusantara.
- Sirojudin, H. A., Tarmizi, R., Irawan, N. C., Dodi, S., Anggraini, D. T., Yuliana, Chakim, M. H. R., Faridah, E., Satyadharma, M., Yusman, F. N., Rossa, M. A., Setyaningsih, T. A., Annas, M., Eldon, M., Noerhatini, P., & Farsiah, L. (2026). *Manajemen strategis sektor publik*. Sada Kurnia Pustaka.
- Stanley, & Ngoei, T. L. W. (2021). Kajian pastoral tentang peranan gembala sidang dalam memberikan motivasi bagi jemaat untuk bermisi. *The Messengers: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 19-33.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tuzahara, S., Fauziah, S. R., Sari, D. M., Rudianto, T., & Arfiani, M. (2025). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Yayasan Pendidikan Hafizh Cendekia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 93-97.
- Waruwu, A. D. S., Gea, A. S., Mendrofa, E. W., Zebua, G. Z. K., Zebua, J. A. S., Telaumbanua, R. E., Zebua, S., Sarototonafo, K., Zai, D. I. Z., Kakisina, S. M., & Waruwu, N. A. (2025). ISAK 335: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba di Yayasan Holiana'a. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 23-30. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5608>